



PROJECT BASED LEARNING PENANGGULANGAN BENCANA SOSIAL TERKAIT KEMISKINAN DI RW.04 KELURAHAN KAMAL

Bagas Pramono Sakti¹, Bagus Kurniawan², Khikmawanto³

Universitas Yuppentek Indonesia

bagaspram27@gmail.com

Abstrak (Indonesia)

Dapat di simpulkan bahwa kemiskinan terdapat menjadi dua sifat yaitu sementara dan kebijakan struktural. Kemiskinan di kelurahan kamal di sebabkan oleh berbagai faktor struktural dan sosial berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan yang komprehensif dan di perlukan penguatan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap pendidikan serta perbaikan kebijakan distribusi bantuan sosial. Pendidikan memiliki pengaruh positif sehingga di harapkan pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas sarana fisik belajar selama 12 tahun, dan meningkatkan kualitas guru dan menurunkan biaya pendidikan agar masyarakat yang kurang mampu bisa menikmati pendidikan. Yang akan berdampak penurunan tingkat kemiskinan di Kelurahan Kamal. Sedangkan pengangguran memiliki pengaruh negative yang signifikan terhadap kemiskinan tetapi dari hasil penelitian ini di harapkan pemerintah mendirikan pusat-pusat latihan kerja dan memperluas lapangan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru agar masalah pengangguran dapat teratasi.

Sejarah Artikel

Submitted: 27 September 2024

Accepted: 2 Oktober 2024

Published: 3 Oktober 2024

Kata Kunci

Project Based Learning
Penanggulangan Bencana
Sosial

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah populasi terbanyak ke-4 di dunia yang berjumlah 278,69 juta jiwa (BPS, 2022). Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Namun fakta yang dapat kita lihat hari ini masih banyak penduduk Indonesia yang belum merasakan kekayaan sumber daya alam dan masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu masih tetap terlihat kemiskinan, berbeda dengan data yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita tetap meningkat walaupun melambat. Di Asia, Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berupaya memerangi kemiskinan. Indonesia memprioritaskan masalah kemiskinan sebagai upaya pendorong prioritas pembangunan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kemiskinan bagaikan benalu yang menggerogoti kemajuan bangsa.

Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Mubyarto (2004) dalam Giovanni (2018), “Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk makanan, pakaian, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang diperolehnya, karena kekurangan sumber daya dan penghasilan”. Kurangnya prospek pekerjaan merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap kemiskinan, yang mempengaruhi baik orang yang bekerja maupun yang menganggur.

Kemiskinan merupakan kondisi yang kompleks dan multidimensi, di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Hal ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap informasi dan teknologi. Untuk mengukur tingkat kemiskinan, setiap negara memiliki standarnya sendiri yang disebut garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini merupakan batas minimal pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar



hidup. Seseorang atau rumah tangga yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai miskin.

Mencari pengertian kemiskinan bukanlah hal yang mudah. Kemiskinan sebagai suatu gejala sosial akan berbeda dengan kemiskinan sebagai gejala ekonomi. Kemiskinan sosial (cultural) lebih banyak berkaitan dengan sikap hidup penduduk miskin yang tidak mempunyai keinginan untuk maju dan berusaha memperbaiki taraf kehidupan. Sedangkan kemiskinan ekonomi merupakan suatu gejala yang terjadi di sekitar lingkungan penduduk miskin dan biasanya dikaitkan dengan masalah pendapatan.

Konsep kemiskinan pada dasarnya berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan batas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Konsep ini dikenal sebagai kemiskinan mutlak (absolut).

Sebaliknya, walaupun tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih kecil dibandingkan dengan tingkat pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang atau rumah tangga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Konsep ini dikenal sebagai kemiskinan relative. Kemiskinan relatif berkaitan dengan masalah pembangunan yang bersifat struktural, yaitu kebijaksanaan yang belum seimbang sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Masalah distribusi pendapatan atau kemiskinan relatif berkaitan erat dengan masalah kemiskinan absolut karena kemiskinan absolut merupakan akibat dari ketimpangan distribusi pendapatan. Jika kesenjangan pendapatan tinggi maka jumlah penduduk miskin pun akan tinggi. Kemiskinan relatif akan selalu timbul selama masih ada ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari suatu masyarakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti: pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Besarnya masalah kemiskinan absolut tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau konsumsinya berada di bawah tingkat minimum yang telah ditetapkan.

Ibukota Indonesia yang berpusat di Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian nasional. DKI Jakarta terbagi menjadi lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten yaitu Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. DKI Jakarta menduduki peringkat atas berdasarkan tingkat kemiskinan terendah se-Indonesia akan tetapi kenyataannya masih ditemui penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang cukup tinggi yang menyebabkan kemiskinan masih terus eksis (S. Fitria et al., 2021).

Seperti kota kota besar lainnya di DKI Jakarta yang memiliki persaingan yang tinggi dalam hal peluang kerja. Permintaan akan pekerjaan seringkali tidak sebanding dengan peluang yang ada dan kualifikasi yang dibutuhkan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja. Pemerintah Jakarta Barat terus mengusahakan berbagai cara dalam pengentasan kemiskinan. namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan pada presentase kemiskinan. Di tengah gemerlapnya pembangunan, masih banyak saudara-saudari kita yang terjebak dalam lilitan kemiskinan, berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Dalam 5 tahun terakhir, persentase kemiskinan di Kota Jakarta Barat berfluktuatif. Pada tahun 2019 persentase kemiskinan Jakarta Barat sebesar 3,25% yang berarti ada sekitar 84.060 penduduk miskin di Jakarta Barat. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan meningkat



sebesar 1% menjadi 4,25% yang berarti ada sekitar 110.900 penduduk yang tergolong miskin di Jakarta Barat. Pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan, kenaikan sebesar 0,06% yaitu menjadi 4,31% yang berarti pada tahun 2021 ada sekitar 113.370 penduduk miskin di Jakarta Barat. Pada tahun 2022 penurunan mulai terjadi, persentase penurunan kemiskinan sebesar 0,10% menjadi 4,22% atau sekitar 112.180 tergolong penduduk miskin di Jakarta Barat. Dan pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan angka, persentase kemiskinan menjadi 4,09% yang berarti ada sekitar 109.490 penduduk miskin di Kota Jakarta Barat pada tahun 2023. Pada tahun 2021 terjadi penurunan paling tinggi yaitu sebesar 1% dan pada tahun 2019 juga menjadi tahun dimana persentase kemiskinan di Kota Jakarta Barat berada pada posisi terendah selama 5 tahun terakhir.

Persentase Kemiskinan Berdasarkan Kotamadya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023

Tahun	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
2019	5,04	3,25	3,68	2,73	3,12
2020	6,78	4,25	4,51	3,43	4,16
2021	7,24	4,31	4,94	3,56	4,28
2022	7,24	4,22	4,90	3,52	4,30
2023	6,78	4,09	4,68	3,10	4,20

Tabel 1. Persentase kemiskinan berdasarkan kotamadya di provinsi DKI Jakarta

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024.

Dalam melihat fenomena kemiskinan di wilayah perkotaan, pendekatan yang bisa digunakan selain pendekatan basic needs approach (garis kemiskinan yang dibentuk Badan Pusat Statistik) adalah pendekatan kemiskinan relatif. Dalam pendekatan kemiskinan relatif, kemiskinan relatif adalah kondisi dimana individu, keluarga dan kelompok dalam suatu populasi tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkan jenis makan tertentu, berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di masyarakat dan memiliki kondisi serta fasilitas yang menjadi standar dalam masyarakat di tempat mereka berada. Sumber daya yang mereka miliki berada di bawah rata-rata standar yang ada di masyarakat tempat mereka berada. Kemiskinan relatif mengaitkan kondisi kurangnya sumber daya dengan standar masyarakat di wilayah tersebut (Townsend, 1979). Menurut Yasa (2008), kemiskinan relatif berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan. Dalam kemiskinan relatif, individu yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya belum tentu disebut tidak miskin, karena apabila dibandingkan dengan penduduk sekitarnya ia memiliki pendapatan yang lebih rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan yang menjadi standar dalam wilayah mereka berada, maka individu tersebut dapat digolongkan menjadi penduduk miskin.

Indonesia juga telah meraih capaian luar biasa dalam pengurangan kemiskinan dengan menurunkan lebih dari separuh angka kemiskinan sejak tahun 1999 menjadi di bawah 10% pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid19 melanda (World Bank, 2022). Diketahui kemiskinan kerap mengalami kenaikan yang signifikan dan kondisinya diperparah dengan efek yang ditimbulkan oleh pandemi Covid19, Sebanyak 175.890 pengangguran disebabkan karena Covid-19. Mereka berhenti bekerja karena perusahaannya terdampak Covid-19 atau pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga menyebabkan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir. Perhatian utama terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama penting namun sulit diwujudkan secara bersamaan. Pengutamaan yang satu akan menuntut dikorbankannya yang lain.



Usaha pemulihan perekonomian terus diupayakan seperti pemberian bantuan sosial, pengembangan UMKM, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yang diharapkan mampu membuka pintu pencarian baru sehingga pertumbuhan ekonomi kembali bangkit. Pertumbuhan ekonomi yang naik dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan bagi perkembangan pembangunan ekonomi dan syarat untuk pengurangan tingkat kemiskinan (Rahmawati & Anwar, 2022).

Pemerintah berganti diharapkan memberikan dampak yang baik untuk pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia khususnya DKI Jakarta sebagai pusat ibu kota. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengurangi kemiskinan yang ada oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih ada yang pro-kontra di internal pemerintahan sendiri, yaitu oleh Kepala Daerah dengan wakil rakyat yang ada di Provinsi.

Namun yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana caranya memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang pantas melakukan, kalangan elit kaya yang minoritas, ataukah mayoritas rakyat yang miskin. Seandainya yang disertai wewenang itu adalah kelas kaya, maka mereka akan mampu memacu pertumbuhan dengan baik, akan tetapi kemungkinan kondisi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan absolut tidak dapat segera teratasi. Tetapi jika yang dipilih adalah mayoritas rakyat miskin, segenap hasilnya harus dibagi secara lebih merata, dan hal ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tinggi.

Seseorang dianggap pengangguran jika dia tidak bekerja sama sekali, atau sedang mencari pekerjaan dan siap bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Sedangkan tingkat pengangguran adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Peningkatan pengangguran di negara-negara yang sedang berkembang disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan kesempatan kerja daripada pertumbuhan yang cepat dari angkatan kerja. Badan Pusat Statistik (2000) faktor utama penyebab kemiskinan terutama karena faktor alamiah. Seseorang menjadi miskin karena mereka dilahirkan dari keluarga miskin. Kemiskinan menyebabkan mereka tidak hanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga tidak mampu mengembangkan status sosialnya. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan mata rantai yang bila diputus akan menyebabkan kemiskinan tersebut selalu ada.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa konteks pembahasan yang menjadi inti pembahasan penelitian ini, antara lain:

- 1) Bagaimana kemiskinan di Kelurahan Kamal, RW. 04, Kalideres, Jakarta Barat memicu terjadinya bencana sosial dalam hal kesehatan, pendidikan dan akses terhadap layanan dasar?
- 2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Kelurahan Kamal, RW. 04, Kalideres, Jakarta Barat? Bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi?
- 3) Apa dampak sosial dari kemiskinan terhadap kehidupan masyarakat di Kelurahan Kamal, RW. 04, Kalideres, Jakarta Barat? Serta bagaimana masyarakat menghadapi juga beradaptasi terhadap bencana sosial tersebut?
- 4) Apa saja intervensi dan kebijakan yang telah diterapkan untuk mengatasi kemiskinan di daerah tersebut? Dan sejauh mana efektivitasnya dalam mengurangi dampak dari kemiskinan?

TUJUAN PENELITIAN



Dari adanya pembatasan dan perumusan masalah di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai capaian yang diharapkan dalam pembahasannya, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kelurahan Kamal, RW. 04, Kalideres, Jakarta Barat.
- 2) Menilai dampak kemiskinan terhadap kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut dengan fokus pada kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar.
- 3) Menggali hubungan antara kemiskinan dan kejadian bencana sosial tersebut serta bagaimana masyarakat beradaptasi dan mengatasi bencana sosial tersebut.
- 4) Mengevaluasi efektivitas intervensi dan kebijakan yang telah diterapkan untuk mengurangi dampak bencana sosial di wilayah tersebut.

MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian tentang bencana sosial terkait kemiskinan di Kelurahan Kamal, RW. 04, Kalideres, Jakarta Barat, baik dari perspektif praktis maupun akademis, seperti:

Manfaat praktis

- ❖ Pengembangan kebijakan: hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif di untuk mengatasi kemiskinan dan bencana sosial di wilayah tersebut. Misalnya, data mengenai faktor-faktor yang memperparah kemiskinan dapat digunakan untuk menyusun program-program pengentasan kemiskinan yang lebih tertarget.
- ❖ Program intervensi: memberikan rekomendasi untuk program intervensi dan bantuan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat terdampak, meningkatkan efektivitas program bantuan sosial.

Manfaat akademis

- ❖ Pengembangan ilmu pengetahuan: penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi, antropologi, dan ilmu pembangunan.
- ❖ Analisis teoritis: menyediakan analisis yang lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.

STUDI LITERATUR

TEORI BENCANA SOSIAL TENTANG KEMISKINAN

Teori bencana sosial tentang kemiskinan mempelajari bagaimana kejadian sosial seperti konflik, kekerasan, dan ketidakstabilan politik dapat memperburuk kemiskinan. Bencana sosial sering kali menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur sosial dan ekonomi, memaksa masyarakat meninggalkan rumah mereka, mengganggu pendidikan, dan menghancurkan sumber mata pencaharian. Mereka yang sudah hidup dalam kemiskinan paling rentan terhadap dampak ini karena mereka memiliki sumber daya yang terbatas untuk melindungi diri dan memulihkan diri setelah bencana.

Para ahli sosiologi dan ilmuwan sosial lainnya telah mengembangkan berbagai teori untuk menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan bencana sosial. Berikut adalah beberapa teori yang relevan:

1. Teori Konflik (Conflict Theory)

- ❖ Menurut Karl Marx, konflik kelas yang disebabkan oleh ketidaksetaraan ekonomi adalah akar dari banyak masalah sosial, termasuk bencana sosial. Kemiskinan yang ekstrem dapat memicu pemberontakan dan revolusi.



- ❖ Pandangan terhadap kemiskinan, kemiskinan dilihat sebagai hasil dari eksploitasi kelas pekerja oleh kelas penguasa. Ketidakpuasan yang muncul dari kondisi ini dapat memicu berbagai bentuk kekerasan dan konflik.
- 2. Teori Struktural Fungsional (Structural Functionalism)
 - ❖ Menurut Emile Durkheim, teori ini menekankan pada pentingnya keseimbangan sosial. Kemiskinan dianggap sebagai anomali yang mengganggu keseimbangan ini.
 - ❖ Pandangan terhadap kemiskinan, kemiskinan dapat menyebabkan disintegrasi sosial dan melemahnya ikatan sosial. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, individu cenderung melanggar norma sosial.
- 3. Teori Interaksionisme Simbolik (Symbolic Interactionism)
 - ❖ Menurut George Herbert Mead, teori ini berfokus pada bagaimana individu memberikan makna pada situasi sosial.
 - ❖ Pandangan terhadap kemiskinan, kemiskinan dapat membentuk identitas dan pandangan hidup seseorang. Individu yang hidup dalam kemiskinan mungkin mengembangkan perasaan inferioritas dan menyalahkan diri sendiri atas kondisi mereka, atau sebaliknya, mereka mungkin mengembangkan rasa solidaritas dengan kelompok sosial yang sama.
- 4. Teori Belajar Sosial (Social Learning Theory)
 - ❖ Menurut Albert Bandura, teori ini menekankan pada pentingnya pembelajaran melalui pengamatan dan imitasi.
 - ❖ Pandangan terhadap kemiskinan, individu yang tumbuh dalam lingkungan yang miskin cenderung mengamati dan meniru perilaku kekerasan atau kriminalitas.

Selain itu, bencana sosial dapat menghambat akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, yang penting untuk keluar dari kemiskinan. Ketidakstabilan sosial dan politik juga dapat menghalangi upaya pengentasan kemiskinan, menciptakan siklus berkelanjutan di mana kemiskinan memicu lebih banyak ketidakstabilan dan sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menangani kemiskinan secara efektif, penting untuk memahami dan mengatasi akar penyebab bencana sosial serta dampaknya terhadap kelompok yang rentan. Beberapa aspek utama dalam teori ini meliputi:

1. Kerentanan Sosial: Kelompok masyarakat miskin sering kali lebih rentan terhadap dampak bencana karena mereka tinggal di daerah yang berisiko tinggi, memiliki akses terbatas terhadap sumber daya, dan memiliki kemampuan yang minim untuk pulih setelah bencana.
2. Distribusi Sumber Daya: Ketimpangan dalam distribusi sumber daya membuat masyarakat miskin sulit mengakses bantuan dan dukungan saat terjadi bencana. Bantuan sering kali lebih mudah didapatkan oleh kelompok masyarakat yang lebih kaya dan berpengaruh.
3. Dampak Jangka Panjang: Bencana sering kali memperburuk kemiskinan dengan menghancurkan aset dan mata pencaharian, memaksa masyarakat miskin untuk berhutang atau menjual aset yang tersisa, yang kemudian menghambat kemampuan mereka untuk bangkit kembali.
4. Pembangunan yang Tidak Merata: Pembangunan yang tidak memperhitungkan risiko bencana bisa memperparah kerentanan masyarakat miskin. Misalnya, pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana tanpa mempertimbangkan mitigasi risiko bisa meningkatkan kerugian saat bencana terjadi.
5. Adaptasi dan Mitigasi: Masyarakat miskin sering kali memiliki sumber daya yang lebih sedikit untuk beradaptasi atau melakukan mitigasi terhadap risiko bencana.



Ini termasuk keterbatasan dalam mengakses informasi, teknologi, dan bantuan finansial untuk memperkuat ketahanan mereka terhadap bencana.

Hubungan Kemiskinan dan Bencana Sosial

- ❖ **Ketidakstabilan Sosial:** Kemiskinan yang meluas dapat menciptakan ketidakstabilan sosial. Ketika sebagian besar masyarakat hidup dalam kondisi sulit, mereka cenderung lebih rentan terhadap provokasi dan mudah terpengaruh oleh ajakan untuk melakukan tindakan kekerasan atau protes.
- ❖ **Kejahatan:** Tingkat kejahatan cenderung meningkat di daerah miskin. Ini bisa disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, kurangnya peluang kerja, atau rasa frustrasi terhadap ketidakadilan.
- ❖ **Konflik Sosial:** Perbedaan yang mencolok antara kelompok kaya dan miskin dapat memicu konflik sosial. Kelompok miskin mungkin merasa diperlakukan tidak adil dan berusaha untuk mengubah situasi tersebut, bahkan dengan cara-cara yang kekerasan.
- ❖ **Kerentanan terhadap Bencana Alam:** Masyarakat miskin sering kali tinggal di daerah yang rawan bencana alam. Mereka memiliki sedikit sumber daya untuk menghadapi bencana ini, sehingga dampaknya jauh lebih buruk.

TEORI MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA SOSIAL TENTANG KEMISKINAN

Kemiskinan dan bencana sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Kemiskinan tidak hanya menjadi penyebab kerentanan terhadap bencana, tetapi juga memperparah dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, dalam manajemen penanggulangan bencana, perhatian khusus harus diberikan pada kelompok masyarakat miskin.

Teori-teori manajemen penanggulangan bencana yang relevan dengan isu kemiskinan ini umumnya berakar pada pendekatan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction). Beberapa konsep kunci yang sering dibahas meliputi:

1. **Siklus Manajemen Bencana**
 - ❖ **Mitigasi:** Upaya untuk mengurangi risiko bencana, termasuk pengurangan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi inklusif, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan penguatan kapasitas masyarakat.
 - ❖ **Kesiapsiagaan:** Mempersiapkan masyarakat, terutama kelompok miskin, untuk menghadapi bencana melalui pelatihan, penyediaan alat-alat evakuasi, dan pengembangan rencana darurat.
 - ❖ **Tanggap Darurat:** Memberikan bantuan kemanusiaan segera setelah bencana terjadi, dengan prioritas pada kelompok yang paling rentan, termasuk masyarakat miskin.
 - ❖ **Pemulihan:** Membantu masyarakat pulih dari dampak bencana, termasuk rekonstruksi infrastruktur, pemulihan mata pencaharian, dan rehabilitasi psikologis.
2. **Pengurangan Risiko Bencana (DRR)**
 - ❖ **Analisis Risiko:** Mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling rentan, termasuk masyarakat miskin, dan menganalisis risiko yang mereka hadapi.
 - ❖ **Pengurangan Kerentanan:** Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana, termasuk melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan organisasi masyarakat.
 - ❖ **Peningkatan Kesiapsiagaan:** Mempersiapkan masyarakat untuk merespons bencana, termasuk penyediaan peringatan dini, evakuasi, dan bantuan darurat.



3. Keadilan Sosial

- ❖ Akses yang Setara: Memastikan bahwa semua orang, termasuk masyarakat miskin, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah bencana.
- ❖ Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat, terutama kelompok miskin, dalam semua tahap manajemen bencana, dari perencanaan hingga pemulihan.

4. Pembangunan Berkelanjutan

- ❖ Integrasi: Menggabungkan upaya penanggulangan bencana dengan pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
- ❖ Lingkungan Hidup: Memperhatikan dampak lingkungan dari bencana dan upaya penanggulangannya, serta mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan.

Hubungan Kemiskinan dan Manajemen Bencana

Kemiskinan sebagai Faktor Penguat: Kemiskinan membuat masyarakat lebih rentan terhadap bencana karena terbatasnya akses terhadap sumber daya, informasi, dan layanan kesehatan. Bencana Memperparah Kemiskinan: Bencana dapat memperburuk kondisi kemiskinan dengan merusak aset, menghancurkan mata pencaharian, dan meningkatkan beban utang.

TEORI CBDM BENCANA SOSIAL TENTANG KEMISKINAN

Teori Community Based Disaster Management (CBDM) atau Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat dalam Konteks Bencana Sosial Kemiskinan adalah sebuah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana. Pendekatan ini mengakui bahwa masyarakat yang paling memahami kondisi dan kebutuhan mereka sendiri, sehingga mereka paling efektif dalam mengelola risiko bencana di tingkat lokal.

Ketika kita berbicara tentang bencana sosial seperti kemiskinan, pendekatan CBDM menjadi sangat relevan. Kemiskinan tidak hanya sebuah keadaan, tetapi juga sebuah proses yang kompleks dan multidimensi, seringkali diperparah oleh bencana alam atau konflik sosial. Masyarakat miskin cenderung lebih rentan terhadap dampak bencana karena kurangnya akses terhadap sumber daya, informasi, dan layanan dasar.

Bagaimana CBDM Menerapkan pada Bencana Sosial Kemiskinan?

1. Pemetaan Risiko

- ❖ Identifikasi Kerentanan: Melalui partisipasi masyarakat, dilakukan pemetaan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan, seperti lansia, anak-anak, perempuan, dan kelompok marginal lainnya.
- ❖ Analisis Faktor Risiko: Menganalisis faktor-faktor yang memperparah kemiskinan, seperti kurangnya pendidikan, akses terbatas pada pekerjaan, dan infrastruktur yang buruk.

2. Penguatan Kapasitas Masyarakat

- ❖ Pemberdayaan: Melalui pelatihan dan pendidikan, masyarakat diberi keterampilan untuk mengelola risiko kemiskinan, seperti pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan produksi pangan.
- ❖ Organisasi Masyarakat: Membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang solid untuk saling mendukung dan mengadvokasi kebutuhan mereka.

3. Perencanaan dan Persiapan



- ❖ Rencana Kontingensi: Menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk menghadapi situasi darurat yang dapat memperburuk kemiskinan, seperti bencana alam atau krisis ekonomi.
 - ❖ Penyediaan Sumber Daya: Memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, baik berupa dana, logistik, maupun jaringan sosial.
4. Tanggap Darurat
- ❖ Mobilisasi Masyarakat: Memanfaatkan jaringan sosial yang telah dibangun untuk memberikan bantuan pertama kepada masyarakat yang terdampak.
 - ❖ Koordinasi dengan Pihak Lain: Bekerjasama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta untuk memberikan respons yang cepat dan efektif.
5. Pemulihan
- ❖ Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi: Membantu masyarakat membangun kembali kehidupan mereka setelah bencana, dengan fokus pada pemulihan mata pencaharian, infrastruktur, dan layanan sosial.
 - ❖ Pengembangan yang Berkelanjutan: Mendorong pembangunan yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko kemiskinan di masa depan.

Prinsip-Prinsip Dasar CBDM dalam Konteks Kemiskinan

- ❖ Partisipasi Masyarakat: Masyarakat memiliki peran sentral dalam semua tahap manajemen bencana.
- ❖ Keadilan dan Kesetaraan: Semua anggota masyarakat, tanpa kecuali, harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang.
- ❖ Pengembangan Kapasitas: Masyarakat harus diberdayakan untuk menjadi lebih mandiri dan tangguh.
- ❖ Kolaborasi: Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Suatu penelitian yang baik akan berjalan lancar jika menggunakan metode penelitian yang tepat Kemal *et al.* (2023).

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang dapat mendukung terhadap objek bencana sosial tentang kemiskinan yang ada di DKI Jakarta khususnya di Kelurahan Kamal, RW. 04, Kalideres, Jakarta Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kasus dan wawancara, yaitu dengan mengumpulkan data-data primer, dan literatur lainnya serta mengajukan pertanyaan yang akan diteliti yang selanjutnya menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya.

Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menguraikan kepada beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai kebijakan bencana sosial tentang kemiskinan di Jakarta. Studi kasus ini dilakukan untuk mendapatkan informasi teoritis sehingga peneliti memiliki landasan teori yang kuat untuk menghasilkan suatu karya ilmiah. Hasil dari perolehan data-data yang terkait dan jumlah penelitian tersebut kemudian dilakukan penyaringan berdasarkan latar belakang dan pembahasan (isi) yang sesuai dengan bencana sosial tentang kemiskinan di Kelurahan Kamal, RW. 04, Kalideres, Jakarta Barat.

A. Teknik Pengumpulan Data

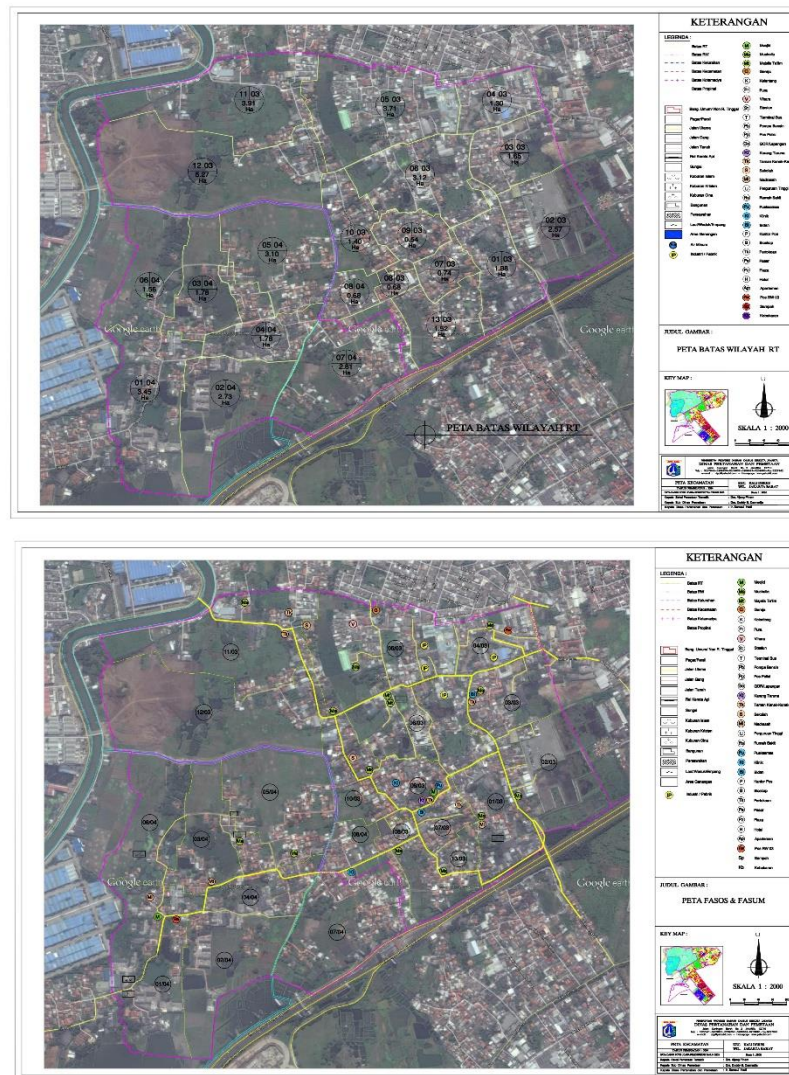


- a) Studi Kepustakaan: Mengumpulkan data sekunder melalui literatur terkait, seperti buku, jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kebijakan penanganan kemiskinan.
 - b) Survei: Menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data primer dari responden yang dipilih secara acak atau purposive sampling. Kuesioner akan mencakup pertanyaan tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
 - c) Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, aktivis sosial, dan masyarakat miskin untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang kebijakan dan efektivitasnya.
 - d) Observasi: Mengamati langsung kondisi kehidupan masyarakat miskin di Kota Tangerang dan bagaimana mereka terpengaruh oleh kebijakan pemerintah.
- B. Teknik Analisis Data
- a) Analisis Deskriptif: Menggambarkan data yang diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi untuk memberikan gambaran umum tentang situasi kemiskinan dan kebijakan yang ada.
 - b) Analisis Kualitatif: Menggunakan teknik coding untuk mengidentifikasi tema dan pola dari data wawancara dan observasi. Analisis ini bertujuan untuk memahami pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan penanganan kemiskinan.
 - c) Analisis Kebijakan: Mengevaluasi kebijakan yang ada dengan membandingkannya terhadap teori dan praktik terbaik di bidang penanganan kemiskinan. Analisis ini juga akan mencakup penilaian efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut.
- C. Time Schedule Kegiatan PBL (Project Based Learning)

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Deskripsi
1.	Persiapan Penelitian	17 Juli 2024	Mencakup penyusunan proposal penelitian, pemilihan sampel, dan persiapan alat pengumpulan data.
2.	Pengumpulan Data	19 Juli 2024	Meliputi studi kepustakaan, survei, wawancara mendalam, dan observasi di lapangan.
3.	Analisis Data	20 Juli 2024	Pengolahan dan analisis data yang telah di kumpulkan menggunakan teknik deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif.
4.	Penyusunan Laporan Penelitian	26 Juli 2024	Penulisan laporan akhir yang mencakup temuan penelitian, analisis, dan rekomendasi kebijakan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kamal Rw 04 Kalideres, Jakarta Barat. Wilayah ini adalah bagian dari Jakarta Barat yang memiliki populasi yang padat dan beragam. Meskipun berada di wilayah perkotaan, banyak warga di Kelurahan Kamal Rw 04 Kalideres yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kawasan ini menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, termasuk akses yang terbatas ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak.



Gambar 1. Peta wilayah Kelurahan Kamal Rw 04 Kalideres, Jakarta Barat.

Di wilayah Kelurahan Kamal Rw 04 Kalideres ini menunjukkan lokasi-lokasi penting seperti pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), sekolah, dan area pemukiman. Area ini juga dekat dengan kawasan industri dan komersial yang mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Menurut tokoh masyarakat dan warga setempat, mayoritas warga RW04 bekerja sebagai buruh lepas, karyawan pabrik, buruh cuci, dan pengepul barang bekas. Penghasilan mereka tidak menentu, dengan pendapatan harian sekitar Rp80.000 hingga Rp100.000. Beberapa warga telah bekerja sebagai karyawan tetap di perusahaan, namun jumlahnya terbatas. Untuk masalah Pendidikan: bahwa program wajib belajar 9 dan 12 tahun dari pemerintah sangat dihargai oleh masyarakat. Bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar Plus sangat membantu, meskipun belum ada sekolah setingkat SMA negeri di wilayah tersebut. Harapannya, adanya sekolah setingkat SMA negeri di wilayah mereka dapat meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan generasi berikutnya. Berbagai program sosial dari Pemprov DKI Jakarta, seperti Kartu Lansia, Kartu Anak Jakarta, Kartu Jakarta Pintar, dan Jakpreneur, dirasakan sangat bermanfaat oleh masyarakat. Program-program ini membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan masyarakat miskin.

Program wajib belajar 9 dan 12 tahun dari pemerintah sangat dihargai oleh masyarakat di wilayah tersebut. Bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar Plus sangat membantu,



meskipun belum ada sekolah setingkat SMA negeri di wilayah tersebut. Harapannya, adanya sekolah setingkat SMA negeri di wilayah mereka dapat meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan generasi berikutnya.

Adapun berbagai program sosial dari Pemprov DKI Jakarta, seperti Kartu Lansia, Kartu Anak Jakarta, Kartu Jakarta Pintar, PPKD (Pusat Pelatihan Kerja Daerah), dan Jakpreneur, dirasakan sangat bermanfaat oleh masyarakat. Program-program ini membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan masyarakat miskin.

Urbanisasi mulai terjadi di wilayah mereka sekitar tahun 2017, dengan pendatang yang semakin banyak dalam 6-7 tahun terakhir.



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak RW. 04



Gambar 3. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Anak-Anak Setempat



Gambar 4. Beberapa Kondisi Rumah Warga di RW. 04, Kelurahan Kamal.

Pusat pelatihan kerja daerah (PPKD) yaitu Satuan lembaga Pelatihan kerja yang dimiliki oleh Pemerintah daerah yang berada di Provinsi DKI Jakarta, yang dibawah langsung oleh Suku dinas Ketenagakerjaan Yang berada di setiap Kota. Salah satu PPKD berada di Jakarta Barat, letaknya di Jalan Kamal Raya nomor 2, RT 07/02 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres.

Faradiasa Sofardi Basuni (Ketua PPKD Jakarta Barat) mengatakan pihaknya membuka beberapa program pelatihan kerja, antara lain pengoperasian komputer, tata busana, tata boga, bahasa Inggris, tata rias, desain grafis, multimedia, teknik las listrik, teknisi mesin berat, teknik mesin pendingin dan teknisi mesin mobil.

Ia mengimbau, warga yang ingin mendaftar pelatihan kerja di bidang pengoperasian komputer, tata boga, bahasa Inggris dan tata busana Langsung bisa datang ke lokasi PPKD Jakarta Barat, Faradiasa menambahkan, saat mendaftar para calon peserta pelatihan kerja harus menyiapkan beberapa syarat administrasi. Antara lain, usia minimal 17 tahun, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI, fotokopi kartu keluarga (KK), pas foto 3x4 dua lembar dan surat keterangan telah divaksin booster.

Untuk pendaftaran gelombang pertama pihaknya menyediakan kuota 20 orang di masing masing jurusan pelatihan dan setiap jurusan memiliki waktu pelatihan yang berbeda, Untuk reguler kejuruan operator komputer dan bahasa Inggris itu 30 hari pelatihan. Sisanya untuk kejuruan lain ada 45 hari, Setelah mengikuti pelatihan, pihaknya juga akan membantu para peserta untuk penempatan ke beberapa perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli. Dengan upaya tersebut diharapkan banyak warga yang terbantu berkerja bahkan membuka lapangan pekerjaan baru.

GAGASAN STRATEGIS

Untuk mengatasi bencana sosial terkait kemiskinan di RW. 04 Kelurahan Kamal, Kalideres, diperlukan pendekatan multisektoral yang komprehensif. Fokus utama harus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta akses terhadap permodalan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program kesehatan, pendidikan, dan sanitasi yang memadai. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam implementasi program-program tersebut.

Kedua, penting untuk meningkatkan akses pendidikan sebagai cara jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan. Program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai akan membantu mereka



mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Penerapan kursus keterampilan vokasional di sekolah-sekolah dan pusat-pusat pelatihan juga dapat memberikan siswa keterampilan praktis yang berguna dalam dunia kerja. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan ini akan meningkatkan peluang kerja di masa depan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Ketiga, penguatan jaringan sosial di tingkat komunitas merupakan strategi penting untuk mengatasi dampak kemiskinan. Membentuk kelompok swadaya masyarakat yang dapat memberikan dukungan sosial dan ekonomi, serta mendirikan pusat layanan komunitas untuk membantu masyarakat dalam masalah-masalah sehari-hari, akan memperkuat solidaritas sosial. Inisiatif ini bisa mencakup bantuan makanan, pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan gratis atau terjangkau untuk keluarga miskin, termasuk pemeriksaan rutin, imunisasi, dan pengobatan penyakit umum, juga dukungan psikologis yang dapat meringankan beban hidup mereka yang kurang beruntung.

Keempat, Perbaikan Permukiman dan Infrastruktur, salah satunya Program Rumah Layak Huni, adanya renovasi rumah-rumah yang tidak layak huni melalui program bantuan renovasi rumah atau pembangunan rumah baru yang lebih layak. Memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air bersih, dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Terakhir, evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan harus dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan efektif dan tepat sasaran. Pengumpulan data secara berkala mengenai kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial di Kelurahan Kamal Kalideres akan memungkinkan penyesuaian strategi yang diperlukan untuk meningkatkan hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dampak kemiskinan dapat dikurangi secara signifikan dan masyarakat bisa mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dapat di simpulkan bahwa kemiskinan terdapat menjadi dua sifat yaitu sementara dan kebijakan struktural. Kemiskinan di kelurahan kamal di sebabkan oleh berbagai faktor struktural dan sosial berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan yang komprehensif dan di perlukan penguatan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap pendidikan serta perbaikan kebijakan distribusi bantuan sosial.

Pendidikan memiliki pengaruh positif sehingga di harapkan pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas sarana fisik belajar selama 12 tahun, dan meningkatkan kualitas guru dan menurunkan biaya pendidikan agar masyarakat yang kurang mampu bisa menikmati pendidikan. Yang akan berdampak penurunan tingkat kemiskinan di Kelurahan Kamal.

Sedangkan pengangguran memiliki pengaruh negative yang signifikan terhadap kemiskinan tetapi dari hasil penelitian ini di harapkan pemerintah mendirikan pusat-pusat latihan kerja dan memperluas lapangan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru agar masalah pengangguran dapat teratasi.

Saran

Agar kemiskinan di wilayah RW. 04 Kelurahan Kamal menjadi lebih baik dan meningkat. Wilayah tersebut memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Hal tersebut diharapkan dapat terjadi penurunan kemiskinan secara signifikan di Kelurahan Kamal. Pendekatan yang terintegrasi dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.



Daftar Pustaka

1. Mujahid. A. (2023). PPKD Buka Pendaftaran Pelatihan Kerja Angkatan Pertama Mulai Februari. *Barat.jakarta.go.id*.
2. Swaramarinda. D. R. (Oktober, 2014). Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di DKI Jakarta. <http://www.jppeb.net>.
3. Faqih. M. A. (2024). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, IPM, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di DKI Jakarta Periode 2017-2022. *Etd.umy.ac.id*.
4. Resmarani. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Jakarta Utara. *Repository.upnjatim.ac.id*.